

Pelindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan Di Kota Makassar



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih
gelar Sarjana hukum jurusan ilmu hukum
Pada fakultas syariah dan hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WIWI WARDANI
NIM.10500113093
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwi Wardani

Nim : 10500113093

Tempat/Tanggal lahir : Makassar 7 juli 1992

Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu hukum/Hukum Perdata

Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/ S1

Alamat : Jalan Sultan Alauddin III Lr. 8

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Perusahaan di
Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek di Kota Makassar", yang disusun oleh Wiwi Wardani, NIM: 10500113093, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 14 Juni 2017, bertepatan dengan 15 Ramadhan-Syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 12 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua: Prof.Dr. H. Darussalam Syamsuddin,M.Ag

(.....)

Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.

(.....)

Munaqisy I : Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

(.....)

MunaqisyII : Drs. H. Munir Salim, M.H.

(.....)

Pembimbing I :Dr.H. Kasjim, M.Th.I.

(.....)

Pembimbing II : Erlina, S.H., M.H.

(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar



Prof.Dr. H. Darussalam Syamsuddin
M.Ag NIP.19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi saudara Wiwi Wardani, **Nim.10500113093**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Tinjauan terhadap hak merek sebagai salah satu aset perusahaan"*, memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

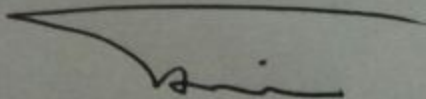
Demikian Persetujuan ini dibeikan untuk diperoses selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

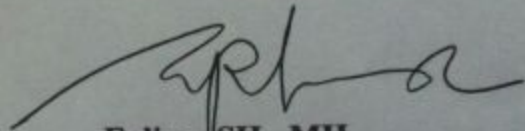
Gowa, 24 Mei 2017

Pembimbing I



Dr. Kasjim Salenda, SH., M. TH. I
NIP. 19600817 199203 1 001

Pembimbing II



Erlina, SH., MH
NIP. 19791219 200501 2 003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji Penulisan skripsi saudara **Wiwi Wardani**, NIM. 10500113093, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Di Kota Makassar**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

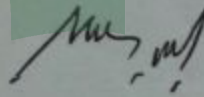
Samata, 7 Juni 2017

Penguji I



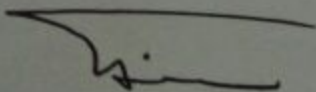
Ahkam Javadi, S.H., M.H.
NIP. 19610404 199303 1 005

Penguji II



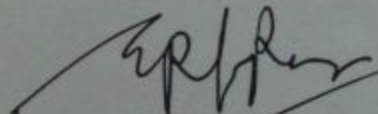
Drs. H. Munir Salim, M.H.
NIP. 19691707201411101

Pembimbing I



Dr. Kasjim Salenda, M. Th.I.
NIP. 19611024 198703 1 003

Pembimbing II



Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19731231 200501 1 034

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warbarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, karena rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar”**, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritis dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu selama proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, bapak dan mama yang tidak pernah lelah membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai pada titik ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga untuk Widya, Winda, Wanda, terima kasih telah menjadi saudara terbaik selama ini. Terima kasih juga untuk tante princess, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama ini.

Selanjutnya juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Musaffir, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan segenap jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.,Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Istiqomah S.H.,M.H., sebagai ketua jurusan ilmu hukum sekaligus sebagai penasihat akademik penulis.
4. Bapak Kasjim Salenda Dr. Kasjim Salenda, M. Th.I. selaku pembimbing I dan ibu Erlina S.H., M.H., selaku pembimbing II.
5. Seluruh dosen fakultas syariah dan hukum, terima kasih telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada seluruh staf perpustakaan, terima kasih telah melayani dengan baik dan menyediakan referensi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada pappi Robby dan Mammi Ila yang tiada hentinya memberikan dorongan dan nasihat yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku dari ibu yang lain, Aldo, Azkiyah, Alfira, Yogi, terima kasih atas semangat dan motivasinya kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis,Agung Amanah, Afri, Ime, Pipit, Wiwi, Silvi, Nurul, dan Ayu. Terima kasih atas dukungannya yang tiada akhir.
10. Teman-teman jurusan ilmu hukum angkatan 2013.
11. Keluarga besar KKN Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa terkhusus kepada warga desa bolaromang.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa, sumbangan pemikiran, bantuan materil dan non materil, penulis ucapkan terima kasih.

Demikianlah kata pengantar penulis, mohon maaf atas segala tulisan yang tidak berkenan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga Allah swt membalas semua amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2017

Wiwi Wardani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Kajian Pustaka.....	3
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	5-39
A. Tinjauan tentang merek	5
1. Pengertian Hak Merek	5
2. Persyaratan Merek	8
3. Sejarah Merek	12
4. Pendaftaran dan Perpanjangan Pendaftaran Merek.....	16
5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	17
6. Pelanggaran Hak atas Merek.....	20
7. Sanksi terhadap Pelanggaran Hak Merek	22
8. Hak Merek dalam Islam	26
B. Tinjauan tentang harta perusahaan.....	31
1. Pengertian Perusahaan	31
2. Bentuk-bentuk Perusahaan.....	32
3. Pengertian harta perusahaan.....	36

4. Penggolongan harta perusahaan.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40-42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR	43-56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Proses Pendaftaran Hak Atas Merek Di Kota Makassar	44
C. Penerapan Sanksi Terhadap Hak Atas Merek Perusahaan.....	50
BAB V PENUTUP.....	57-58
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Peneltian.....	57
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Wiwi Wardani
NIM : 10500113093
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan Di Kota Makassar

Pokok masalah penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pendaftaran Hak atas Merek di Kota Makassar? 2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggar hak atas merek perusahaan?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini berupa sumber data primer yakni wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar dan data sekunder yakni aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel dari internet. Selanjutnya, teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kalimat sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketidaktepatan Dirjen HKI dalam proses pemeriksaan merek sehingga mengakibatkan kerancuan serta kerugian terhadap pemilik merek dan pendaftar merek selanjutnya. Selain itu penerapan sanksi lebih banyak berupa sanksi pidana dan perdata. Padahal sanksi yang paling berat sesungguhnya adalah sanksi administrasi berupa penghentian pemakaian merek.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) hendaklah Dirjen HKI selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran merek, lebih teliti dalam proses pendaftaran merek. 2) Sebelum melakukan tahapan-tahapan pendaftaran, baik pihak pendaftar maupun Dirjen HKI melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap merek yang akan didaftar. Hal tersebut untuk menghindari terbitnya sertifikat merek dengan merek yang sama baik keseluruhan maupun pada pokoknya. 3) Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi. Dengan pemberlakuan sanksi administrasi maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia HaKI sudah diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya pengaturan tentang merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Hak Milik Perindustrian yaitu dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb 545 Tahun 1912. Kemudian UU ini diganti dengan UU Merek No.21 Tahun 1961. Setelah itu UU Merek terus mengalami revisi berkali-kali diantaranya menjadi UU No.19 Th 1992, UU No.14 Tahun 1997 dan yang terbaru adalah UU No. 15 Th 2001. Jadi jika dicermati maka bidang HKI dimana merek merupakan salah satu bagiannya, di Indonesia sudah mendapat perhatian sejak zaman sebelum Indonesia merdeka.

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*).

Suatu merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang

diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen.

Hak Merek merupakan bagian dari HKI. Merek dianggap sebagai “roh” dari suatu produk. Bagi pengusaha, merek merupakan aset yang sangat bernilai karena merupakan ikon kesuksesan sejalan usahanya yang dibangun dengan segala keuletan termasuk biaya promosi. Bagi produsen merek dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil produksinya.

UU No 15 tahun 2001 telah mengatur mengenai sistem perlindungan merek, namun pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek di Indonesia. Oleh karena itu maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai perlindungan terhadap hak merek di kota Makassar. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak penulis teliti adalah yang pertama adalah bagaiman proses pendaftaran hak atas merek di Kota Makassar dan fokus penelitian yang kedua adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak atas merek perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut, kemudian penulis jabarkan dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendaftaran hak atas merek di Kota Makassar?
2. Bagaimana ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak atas merek perusahaan?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memeili relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

OK. Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dimana dalam buku ini membahas mengenai merek yaitu; definisi merek dan hak merek, serta dasar hukum merek. Berikutnya buku ini juga membahas Proses penyelesaian sengketa merek.

Ahmadi Miru dalam bukunya hukum merek: cara mudah mempelajari hukum merek membahas mengenai; penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek serta mengenai administrasi merek.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas merek di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak atas merek di Kota Makassar.

2. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak atas merek perusahaan di Kota Makassar. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu HaKI.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Faktor-faktor Penyebab pelanggaran hak atas merek perusahaan di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Hak Merek

1. Pengertian Hak Merek

berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, merek didefinisikan sebagai berikut:

merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain. Merek merupakan kekayaan industri, dan tentu termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, merek dilindungi melalui undang-undang nomor 15 tahun 2001.¹

Didalam jurnal *Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse* mendefinisikan merek sebagai berikut:

A trademark is a word, name, symbol, or device that is used in trade with goods to indicate the source of the goods and to distinguish them from the goods of others.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat

¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk beluknya, (Jakarta : Esensi, 2008) h. 50.

memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada kemasan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai:²

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Undang-undang merek Indonesia mengatur tentang jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek yang dimaksudkan terdiri dari: merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

² Budi Agus Riswandi, M Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Cet. I; Jakarta: fajar Interpretama Offset, 2004), h. 84

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam undang-undang merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come* atau *first out*. Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.³

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek karena merek kolektif ini sebenarnya terdiri atas merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang pada pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut: Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. sedangkan merek jasa pada pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

³ Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum h. 84-85.

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan pada bentuk dan wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik merek lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:⁴

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Lebih lanjut Prof. R. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu Undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:⁵

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*).
2. Merek dengan perkataan (*word mark*).
3. Kombinasi dari *beel mark* dan *word mark*.

2. Persyaratan Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat

⁴ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 458

⁵ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h. 459

diterima dan digunakan sebagai merek, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau perdagangan dan jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: bentuk, warna, atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube* dan botol. Semua itu tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap suatu merek tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.

Untuk lebih jelasnya, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek yang bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Didalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga gambaran-gambaran yang dari segi keamanan dan segi penguasa tidak dapat diterima

karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan dalam suatu merek dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Tanda tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya lukisan sepeda untuk produk sepeda atau kata-kata yang menunjukkan sifat barang, seperti misalnya “istimewa” atau “super”. Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dapat dipakai sebagai merek. Misal merek “kecap” untuk produk kecap atau merek “sabun” untuk produk sabun.

3. Tanda milik umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi bagi orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruhnya tulang bersilang, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga yang tidak dapat digunakan misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang tangan yang dikepal dan ibu jari keatas, yang umum dikenal sebagai tanda pujian atau jempol.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek kopi atau gambar kopi untuk produk kopi. Ini bermaksud agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

Pemakaian suatu merek dalam praktik juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembeda merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet karena akan menjadikan daya pembedanya menjadi lemah. Sebaliknya juga tidak dapat dipergunakan tanda-tanda yang terlalu mudah, karena juga hal ini tidak dapat member kesan pembeda atas suatu merek. Agar supaya dapat memberikan ciri pribadi kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan tersebut harus memiliki kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang hanya merupakan suatu garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan juga hanya suatu angka yang terlalu mudah atau dikedepankan sebagai suatu kombinasi yang terlalu sederhana.

Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembedaan karena warna atau cara memberikan lukisan yang bersangkutan bisa juga kita terima sebagai merek.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan tidak terdapat

adanya sanggahan dari pihak manapun maka Dirjen HaKI akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. Dan akan menolak permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

3. Sejarah Merek

Merek digunakan untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Di Inggris dan Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikut sertakan bentuk tampilan produk didalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Peraturan merek yang pertama kali diterapkan Inggris adalah hasil adopsi dari Prancis tahun 1857, dan kemudian membuat aturan tersendiri, yakni *Merchandise Act* tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang. kemudian, tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang disebut *trademark registration treaty*.⁶

Di Indonesia terdapat UU merek Tahun 1961 yang menggantikan *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 nomor 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214*. Perkembangan berikutnya, tahun 1992 lahir UU merek baru yang kemudian direvisi tahun 1997 dan 2001 dengan menyesuaikan terhadap TRIPs.

⁶ Endang Puwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Cet. I; Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), h. 8.

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik merek. Menurut Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, terdapat kualifikasi merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, yaitu sebagai berikut:

1. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
2. Merek tidak dapat didaftar bila merek tersebut mengandung salah satu unsur: (a) bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, (b) moralitas agama, (c) kesusilaan, (d) ketertiban umum, (e) tidak memiliki daya pembeda, (f) telah menjadi milik umum, (g) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Permohonan pendaftaran merek ditolak bila merek tersebut: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang/jasa yang sejenis; (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; (c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal; (d) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (e) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; (f) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang

digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Di dalam undang-undang merek juga diatur mengenai indikasi geografis atau indikasi asal. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan asal daerah suatu barang berdasarkan faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua hal tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu terhadap barang yang dihasilkan. Jadi, reputasi, kualitas dan karakteristik spesifik dihasilkan oleh adanya faktor geografis. Indikasi asal dilindungi hukum, tetapi tanpa melalui pendaftaran.

Suatu hal penting dalam hukum merek adalah perlindungan terhadap merek terkenal. *Economic interest* atas merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional *WIPO Treaty*, yang juga diatur kemudian oleh Negara-negara Amerika, Australi, Inggris, dan Indonesia. Ciri spesifik dari merek terkenal adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak terbatas pada produk tertentu atau jenis tertentu, misalnya Marlboro yang tidak hanya digunakan sebagai produk rokok, tetapi juga digunakan pada pakaian; Panther tidak hanya untuk jenis kendaraan, tetapi juga produk minuman. Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang di mana merek didaftarkan.

Reputasi dalam dunia perdagangan dianggap sebagai tolok ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Pebisnis dengan sengaja memasang iklan untuk membangun reputasi produk maupun untuk mengenalkan produk baru di pasaran dan mempertahankan reputasi produk yang sudah ada sebelumnya. *Passing off* melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak yang ingin membonceng keberhasilan mereka sehingga para pembonceng tidak dapat lagi menggunakan merek, kemasan

atau indikasi lain yang bisa mendorong konsumen yakin bahwa produk yang dijual mereka dibuat oleh orang lain. Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa penggugat memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk berasumsi bahwa produk itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat.⁷

Seiring berkembangnya perdagangan internasional, terwujudlah persetujuan TRIPs yang memuat norma standar perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk didalamnya tentang hak merek. Indonesia pun telah meratifikasinya pada tahun 1997. Setiap revisi aturan merek Indonesia dimaksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya dalam perdagangan internasional, menyediakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mengadaptasi konvensi-konvensi internasional.

Konvensi internasional tentang merek sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni *the paris convention for the protection of industrial property*, yang kemudian terkenal dengan konvensi paris.⁸ Konvensi ini disusul dengan perjanjian Madrid, Konvensi Hague serta Perjanjian Lisabon. Dari semua konvensi tersebut, yang menjadi dasar perlindungan merek adalah konvensi paris. Pada tahun 1934, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, sebenarnya Hindia Belanda telah menjadi anggota uni paris. Namun Indonesia tidak secara otomatis tetap menjadi anggota konvensi paris. Pada tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota uni paris setelah mengadakan permohonan atau pernyataan tertulis secara sepihak untuk turut serta pada konvensi tersebut.

⁷ Endang Puwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, h. 9.

⁸ Endang Puwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, (h. 10).

Namun demikian, pada saat itu Indonesia mengadakan reservasi terhadap pasal-pasal penting sehingga kemudian reservasi tersebut dicabut pada tahun 1997.

4. Pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran Merek.

Setelah kantor Merek melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan menganggap bahwa permohonan telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, maka selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran, mengumumkan permintaan pendaftaran tersebut yang berlangsung selama enam (6) bulan dan dilakukan dengan:⁹

- a. Menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, dan
- b. Menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merek.

Selama jangka waktu pengumuman setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman dan tidak ada sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan Substantif terhadap permintaan pendaftaran merek. Pemeriksaan diselesaikan pada waktu selambat-lambatnya Sembilan bulan sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan. Dalam hal permintaan pendaftaran merek dapat disetujui, maka kantor merek:¹⁰

⁹ Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN (Cet.I ; Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 75

¹⁰ Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN, h. 75.

- a. Mendaftar merek tersebut dalam daftar umum merek;
- b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- c. Memberikan sertifikat merek; dan
- d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek.

Selanjutnya UU No. 15 tahun 2001 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi :¹¹

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

5. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek

a. Penghapusan

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:¹²

- a. Atas prakarsa Direktorat Jendral; atau
- b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:¹³

¹¹ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 486.

¹² Ahmadi Miru, Hukum Merek: cara mudah mempelajari undang-undang merek (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h.79

¹³ Ahmadi Miru, Hukum Merek: cara mudah mempelajari undang-undang merek, h.79-80

- a. Merek tidak digunakan dalam 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral yaitu: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Permohonan Penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jendral dan penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Dalam hal merek yang dimohonkan penghapusan pendaftarannya masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Ketentuan itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penerima lisensi agar tidak dirugikan oleh adanya penghapusan atas permintaan pemilik merek atau kuasanya karena untuk memperoleh merek tersebut tentu penerima lisensi telah mengeluarkan biaya. Disamping biaya untuk pembayaran royalti kepada pemilik merek, juga biaya lain yang digunakan dalam mempersiapkan/memproduksi barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut.

b. Pembatalan

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-undang. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jendral.

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi. Walaupun kompetensi relative dari Pengadilan Niaga telah ditentukan, dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas Agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

6. Pelanggaran Hak Atas Merek

Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Penggunaan merek dagang dalam pengertian seperti kita kenal dewasa ini mulai berkembang tidak lama setelah dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad XVIII, yang digunakan untuk memberi tanda produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).

Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan. Melihat kenyataan tersebut, maka berbicara mengenai merek harus dimulai dengan menganalisis rasionalisasi ekonomi dan justifikasi hukum. Dengan kata lain, mengkaji filosofisnya tentang merek perlu dikedepankan daripada hanya terbatas dari sisi administratifnya, seperti pendaftaran merek, pembatalan merek dan sebagainya. Sungguhpun berbagai peraturan merek telah diterbitkan, pelanggaran merek masih sangat banyak. Kasus peniruan, pembajakan ataupun pendomplengan reputasi (*passing of*), dan hak milik intelektual lainnya.

Dalam perkembangannya, fungsi merek mengarah sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) bagi produsen atau para pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Dalam jurnal *The Impact Of Brand Image and Consumer Behavior* disebutkan:

For marketers, whatever their companies' marketing strategies are, the main purpose of their marketing activities is to influence consumers' perception and attitude toward a brand, establish the brand image in consumers' mind, and stimulate consumers' actual purchasing behavior of the brand, therefore increasing sales, maximizing the market share and developing brand equity.

Tujuan utama dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pemilik merek adalah untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu. Sehingga hal terpenting yang harus dilakukan pemilik merek adalah membangun dan mempertahankan citra merek mereka.

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well know trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis).

dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "Lux" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "Lax". Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi.

suatu bentuk, proses atau cara perbuatan pemalsuan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktifitas persaingan usaha tidak sehat.

Usaha pelanggaran merek dengan berbagai modus Orang tetap saja terjadi, terbukti dalam masyarakat masih banyak menggunakan produk-produk palsu yang menimbulkan kerugian bagi pemilik hak merek sebagai pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut serta melindungi hak-hak yang dimiliki pemilik merek maupun penerima lisensi, dapat dilakukan upaya hukum melalui badan peradilan (litigasi) yaitu untuk mengajukan gugatan perdata dan pidana. Pemakaian merek dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

7. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek

Sehubungan dengan Penegakan Hukum atas Pelanggaran merek pada pokoknya maka perlu terlebih dahulu akan di jelaskan mengenai apa itu yang di maksud dengan Penegakan hukum. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Adapun penegakan hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek meliputi, Penegakan Hukum Administratif, Hukum Pidana serta Hukum perdata.

a) Penegakan sanksi Pidana

Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis”

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yaitu sistem *first to file*, yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan / atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

apabila di rinci unsur-unsurnya maka dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.

pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, di berlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil dengan Ketentuan Khusus (Lex Specialis) Tentang Penyidikan pada Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Sistem Peradilan Pidana yang di gariskan KUHAP adalah sistem Terpadu Aktivitas, pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi gabungan

(collection of function) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP.

b) Penegakan Sanksi perdata

Pasal 76 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi.

Pasal 76 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Seluruh gugatan ditunjukan kepada Pengadilan Niaga.

Hak Merek merupakan suatu hak kebendaan, oleh karena haknya bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Di dalam Pasal 76 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.

c) Penegakan sanksi administrasi

Tindakan Administratif merupakan kewenangan yang di limpahkan pada Kantor merek yang dapat di kenakan pada setiap orang/badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek, sesuai dengan kewenangnya Tindakan administratif yang dapat di lakukan oleh kantor Merek antara Lain:

- 1) Melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran Merek. Pada tahap proses permintaan pendaftaran merek, Peranan Kantor Merek sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Dengan kewenangan yang di milikinya, kantor Merek berhak menolak permintaan pendaftaran.
- 2) Penghapusan Pendaftaran Merek dari DUM (Daftar Umum Merek). Dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 undang - undang memberikan wewenang kepada kantor Merek secara " Ex officio" atau atas prakasa sendiri untuk mengambil tindakan administrasi, yakni melakukan penghapusan pendaftaran merek dari DUM (Daftar Umum Merek). tindakan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan Kantor merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan Bahwa merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

8. Hak Merek dalam Islam

Kehidupan umat manusia terus mengalami pergeseran dan perubahan. Demikian juga dengan pola pikir dan persepsi mereka tentang suatu urusan, dari hari ke hari, terjadi perubahan dan perkembangan. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada satu aspek kehidupan saja, akan tetapi terjadi pada seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk dalam urusan harta benda dan perniagaan.

Betapa banyak barang yang pada zaman dahulu, dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi, akan tetapi sekarang, nilai barang tersebut telah sirna. Masyarakatpun telah memandangnya dengan sebelah mata bahkan mungkin saja tidak lagi memiliki nilai ekonomis sedikitpun. Sebaliknyapun demikian, betapa banyak barang yang dahulu tidak bernilai ekonomis sedikitpun, akan tetapi sekarang barang tersebut bernilai jual tinggi.

Diantara hal yang dahulu tidak bernilai ekonomis, akan tetapi pada zaman kita bernilai ekonomis besar ialah kekayaan intelektual. Masyarakat telah memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal lain.

Dizaman sekarang, kekayaan telah mencakup hal-hal non materi, diantaranya kekayaan intelektual. Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk memfilter aktifitas dan tradisi mereka; yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang yang merugikan diijaukan. Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya. (*Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 1/138)

Bila demikian adanya, maka pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan dengan Syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia. (*Qararat Al Majma' Al Fihi Al Islami* hal: 192).

2. Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal – sebagaimana ditegaskan oleh Imam As Syafii- adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.” (*Al Umm* 5/160)

Atau: “Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda”, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. (*Al Mantsur fil Qawaid* oleh Muhammad bin Bahadar Az Zarkasyi As Syafi'i 3/222)

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis.

Dalil Bagi Pengakuan Terhadap Kekayaan Intelektual

Setelah anda mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, maka berikut beberapa dalil yang menguatkan pemahaman tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)

Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang di dasari atas asas suka-sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa kekayaan intelektual, adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela bila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin darinya.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum menghasilkan suatu merek seseorang telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Semua itu ia korbankan demi menghasilkan suatu karya yang berguna. Bila demikian, maka sudah sepantasnya anda memberikan penghargaan yang setimpal atas pengorbanannya tersebut.

Imbalan yang dipungut oleh seorang pencipta merek sama halnya dengan upah atau gaji yang didapatkan oleh seorang guru. Keduanya sama-sama telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan banyak hal demi mewujudkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Seperti yang tertera dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* menuturkan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka.” (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih)

Tatkala kita membeli suatu karya hasil pemikiran seseorang , atau yang serupa, berarti anda telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh pencipta atau pemilik merek atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadits ini, maka anda berkewajiban untuk memenuhi persyaratannya.

Fatwa Ulama

Majelis MAjma' Fiqih Islami International dalam muktamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1988 M, setelah mengkaji beberapa makalah dari para ulama dan para ahli tentang hak-hak maknawiyah, serta setelah mendengar diskusi yang terkait dengan hal itu, menetapkan sebagai berikut:

1. nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan, adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya. Dan di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya
2. dibenarkan untuk memperjual-belikan nama usaha, merek dagang, atau logo dagang itu, atau mempertukarkannya dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, penipuan dan kecurangan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.
3. hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya.

Masyarakat juga sudah seharusnya tidak boleh melakukan transaksi dengan para pemalsu merek dengan membeli produk-produk dari mereka. Karena setiap muslim diperintahkan untuk mengingkari semua kemungkaran dan berusaha merubahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelian terhadap produk dengan merek palsu adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karena hal itu berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak dibenarkan.

B. Tinjauan Tentang Harta Perusahaan.

1. Pengertian perusahaan

Pada awalnya istilah perusahaan di dalam KUHD (Stb. 1847-23) tidak ada dan yang dikenal waktu itu adalah perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan KUHD pada tanggal 17 Juli 1938 dengan Stb. 1938-276 istilah pedagang diganti dengan perusahaan. Namun mengenai pengertian perusahaan ternyata didalam KUHD sendiri tidak memberikan pengertiannya.

Sehubungan dengan hal itu Purwosutjipto (1978:13) mengatakan, bahwa ketiadaan penafsiran secara resmi dalam KUHD memang disengaja oleh pembentuk Undang-undang, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Oleh karena tidak ada pengertiannya, maka selanjutnya diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi.¹⁴

¹⁴ Gatot Supramo, kedudukan perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 2

Menurut Molengraaft yang memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, bahwa perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.¹⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang harus ada yakni: terus-menerus tidak terputus-putus, secara terang-terangan, berhubungan dengan pihak-pihak ketiga, dalam kualitas tertentu, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian, dan berniat memperoleh laba.

Dengan melihat unsur-unsur tersebut, maka suatu perusahaan itu menjalankan kegiatannya harus berlangsung dalam waktu yang relative lama. Kemudian sifatnya terbuka, dalam arti dapat melakukan hubungan dengan siapa saja, sehingga dimaksudkan agar kegiatannya dapat berlangsung terus-menerus. Selanjutnya tentang kualitas tertentu, bahwa bidang kegiatannya harus spesifik atau ada kekhususan misalnya kegiatan yang bergerak di bidang jasa angkutan bus, di bidang perdagangan gula, di bidang pembuatan genteng, dan sebagainya. Tujuan menjalankan sebuah usaha tidak lain adalah berniat mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pada dasarnya akan kembali sebagai modal dalam rangka melaksanakan aktifitasnya yang tidak boleh terputus-putus. Kemungkinan akan mengalami kerugian bukanlah merupakan termasuk unsur pengertian perusahaan, karena bukan suatu hal yang sebenarnya diharapkan.

2. Bentuk-bentuk perusahaan

Ada sejumlah perusahaan yang bentuknya dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain segi jenis, kepemilikan modal, dan usahanya. Dilihat dari segi jenisnya,

¹⁵ Gatot Supramo, kedudukan perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata, h. 2-3.

bentuk perusahaan ada beberapa macam yaitu: perusahaan perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, dan koperasi.

a. Perusahaan perorangan

Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang berbentuk perorangan tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, namun bentuk perusahaan yang demikian dalam kenyataannya banyak terdapat di masyarakat. Perusahaan jenis ini didirikan oleh satu orang dengan modal pribadi dan manajemennya sangat sederhana. Sebagai perusahaan perorangan, bukan berarti usahanya selalu dikerjakan sendiri, akan tetapi pemiliknya dapat mempekerjakan sejumlah orang untuk membantu dalam memperlancar usahanya.

b. Persekutuan Perdata

Istilah persekutuan perdata asalnya adalah terjemahan dari *burgerlijke maatschap*. Istilah tersebut digunakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (2003:436), Namun Soekardono (1964:35) memakai istilah “perserikatan perdata”.¹⁶ Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUHPerdata adalah:

Perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Jadi mendirikan suatu persekutuan perdata tergolong sangat sederhana persyaratannya, hanya dengan perjanjian lisan saja perusahaan dengan bentuk persekutuan ini sudah terjadi. Akibatnya perjanjian itu mengikat para sekutu dan mulai berlaku sejak saat perjanjian. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Persekutuan Firma

¹⁶ Gatot Supramo, kedudukan perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata, h. 13

Dalam pasal 16 KUHD disebutkan bahwa:

“Persekutuan Firma adalah tiap-tiap perikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah nama bersama”.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa ada tiga unsur di dalamnya yaitu: unsur pertama, pendirian persekutuan firma dengan suatu perjanjian, dengan demikian harus ada kesepakatan dari para sekutunya. Unsur kedua, tujuannya untuk menjalankan perusahaan yang berarti mencari keuntungan. Unsur ketiga, persekutuan firma dengan menggunakan nama bersama.

Dengan ketiga unsur tersebut, tampak bahwa dalam pengertian dalam pasal 16 KUHD lebih menitikberatkan tentang masalah pendirian persekutuan dan tujuannya mencari keuntungan.

d. Persekutuan Komanditer

Pengertian persekutuan komanditer dapat dilihat dalam pasal 19 ayat (1) KUHD yang berbunyi:

Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya pada pihak yang satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak yang lain.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa nama lain dari persekutuan komanditer adalah persekutuan melepas uang. Disebut persekutuan melepas uang karena didalam persekutuan itu terdapat sekutu yang melepas uang sebagai salah satu unsurnya. Di samping sekutu melepas uang, terdapat juga sekutu lain dengan tanggung jawabnya tanggung menanggung, sebagaimana halnya sekutu pada persekutuan firma.

e. Perseroan Terbatas

Hukum perseroan terbatas diatur dalam KUHD yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD. Dalam perkembangannya Negara kita membentuk ketentuan baru tentang PT yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dalam UUPT pengertiannya sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 1 yakni:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Karakteristik PT menurut Undang-Undang:

1. Merupakan badan hukum
2. Terbentuk dari kumpulan/persekutuan modal yang terbagi dalam saham
3. Didirikan berdasarkan perjanjian, yang tentunya perjanjian tersebut harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian yaitu ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.

Untuk mendirikan PT maka para calon pendiri harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu:

1. Pendiri minimal dua orang atau lebih (pasal 7 ayat 1)
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (pasal 7 ayat 4)

5. Modal dasar minimal Rp.50.000.000 dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 33 dan pasal 34)
6. Minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris (pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3)

Akta pendirian harus dibuat oleh setidaknya-tidaknya dua orang, dalam format akta Notaris, dan dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain dengan berdasarkan surat kuasa.

Pengertian PT dalam KUHD lebih menekankan pentingnya nama dalam perseroan, hal ini disebabkan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya tentang persekutuan firma dan persekutuan komanditer nama sekutu atau nama pengurus dapat digunakan untuk nama persekutuan. KUHD berkeinginan menegaskan nama-nama tersebut tidak digunakan untuk PT lagi, tetapi tujuan perusahaannya.

Berbeda dengan UUPT pengertian PT lebih ditegaskan mengenai status perusahaannya, dan masalah permodalannya yang berupa saham. Sedangkan nama PT diatur dalam pasal tersendiri.

3. Pengertian Harta Perusahaan

Harta merupakan kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuk baik yang berwujud materi maupun manfaat. Sehingga dapat didefinisikan harta perusahaan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa harta berwujud maupun tidak berwujud serta memiliki nilai uang dan mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kekayaan perusahaan harus dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi. Pendapat ini tidak dibenarkan oleh Polak dan Molengraaff, sebab:¹⁷

- a. Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang tetap maupun tidak tetap, baik yang telah ada maupun aan diperolehnya merupakan jaminan bagi seluruh perikatan-perikatan pribadinya.
- b. Pasal 1132 KUHPerdata menetapkan bahwa harta kekayaan merupakan jaminan bagi semua kreditornya bersama-sama.
- c. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan, yaitu pencatatan mengenai harta kekayaan pribainya maupun harta kekayaan perusahaannya, sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui hak dan kewajiban pengusaha tersebut.
- d. Pasal 19 peraturan kepailitan Staatsblad tahun 1905 No.217 menetapkan bahwa kepailitan tidak hanya mengenai seluruh harta kekayaan debitur pada saat dinyatakan pailit, tetapi mengenai juga harta kekayaan yang didapat selama kepailitan berjalan.
- e. Pasal 18 KUHD menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan firma bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh perikatan dari persekutuan firma itu.

Menurut Polak dan Molengraaff kekayaan perusahaan tidak terlepas dari kekayaan pribadi pengusaha. Pendapat Polak dan Molengraaff berdasarkan pasal-pasal di atas yakni seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan pribadi. Selain itu

¹⁷ Farida Hasyim , Hukum Dagang (Cet.IV; Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 112

tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

4. Penggolongan harta perusahaan

Kekayaan perusahaan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Harta perusahaan dapat diklasifikasikan kedalam:

- a. Harta lancar, adalah harta yang berupa uang kas/bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang, atau umur pemakaiannya kurang dari satu tahun. Yang termasuk harta lancar adalah sebagai berikut:
 - a) Kas
 - b) Efek (Surat berharga) berupa saham dan obligasi.
 - c) Piutang atau tagihan kepada pihak lain tanpa disertai perjanjian tertulis dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
 - d) perjanjian tertulis dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
 - e) Pelengkapan barang yang digunakan perusahaan yg habis terpakai dlm jangka waktu kurang dari satu tahun.
 - f) Beban dibayar dimuka
 - g) Pendapatan yg akan diterima
 - h) Persediaan barang dagangan yang belum terjual
- b. Investasi jangka panjang berupa :
 - a) Investasi dalam bentuk saham
 - b) Investasi dalam bentuk obligasi
 - c) Investasi dalam bentuk dana-dana

- c. Harta Tetap yaitu harta yg digunakan perusahaan yg mempunyai umur ekonomi lebih dari satu tahun.
- d. Harta tidak berwujud atau harta yang mendapat hak-hak istimewa dari pemerintah. Misalnya hak cipta, hak merek dan hak paten.
- e. Harta Lain-Lain atau harta yang tidak dapat dimasukkan ke harta-harta lain. Misalnya mesin yang tidak terpakai, tanah yang tidak jadi tempat usaha.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Peneliti

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh dan aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih penulis yaitu di Kota Makassar yakni di Pengadilan Negeri. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Makassar karena kasus pemalsuan merek sangat sering terjadi dan distribusi produk hasil pemalsuan merek tersebut kemudian disalurkan ke berbagai tempat di wilayah Sulawesi selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori primer dan sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu proses Tanya

jawab antar dua orang atau lebih, bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu:

1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian suatu alat yang mengukur fenomena sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan terstruktur. Kedua, yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga

diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan digunakan materi sebagai berikut:

- a. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
- b. Koperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
- c. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Kota Makassar terletak di jalan Kartini No. 18 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri sangat strategis, tepatnya berada di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat Kota Makassar untuk menjangkau Pengadilan tersebut.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara pidana dan perdata. Tugas pokoknya yakni menerima, memeriksa, dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah hukumnya. Dalam bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Makassar sangat berperan memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar

VISI:

“Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung”

MISI:

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati.
- f. Melaksanakan kekuatan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

B. HASIL PENELITIAN

1. Proses Pendaftaran Hak Atas Merek Di Kota Makassar

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Akan tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.

Menurut Molengraaf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.

Untuk Pelanggaran terhadap merek sendiri motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Praktek perdagangan tidak jujur terkait merek meliputi cara-cara berikut ini :

- 1) Praktek peniruan merek dagang
- 2) Praktek pemalsuan merek dagang

Untuk menghindari masalah tersebut tidaklah terlalu sulit. Para pemilik merek cukup melakukan pendaftaran pada Dirjen HKI. Perlindungan terhadap hak merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif. Pendaftaran Merek mutlak untuk perlindungan hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan untuk merek tersebut. Akan tetapi sekali didaftarkan dan mendapatkan sertifikat merek, maka merek tersebut akan dilindungi dan orang lain tidak dapat menggunakan merek yang sama. Itulah mengapa disebut sebagai hak eksklusif.¹

Oleh karena itu sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal lain dapat dilihat dari ketentuan pasal 2 Undang-

¹ Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 11 April 2017.

undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut.

Adapun tahapan-tahapan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

- 1) Penelusuran merek
- 2) Pengajuan permohonan
- 3) Pendaftaran
- 4) Pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif
- 5) Pengajuan gugatan
- 6) Pemeriksaan kembali

Sebelum pendaftaran sebuah merek diterima, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Namun yang menjadi persoalan adalah beberapa merek pendompleng merek terkenal bisa dengan mudah diterima dan masuk dalam daftar merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal tersebut diakibat ketidak telitian Dirjen HKI dalam proses pendaftaran merek.

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah didaftarkan, maka permintaan pendaftaran merek harus ditolak. Celakanya, sering terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya.

Menurut penulis, Dirjen HKI sudah seharusnya lebih teliti ketika melakukan pemeriksaan merek. Karena apabila terjadi sedikit saja kelalaian maka akan berbuntut panjang dan mengakibatkan kerancuan. Memang tidak sederhana tugas seorang pemeriksa pendafataran merek. Namun untuk menghindari kesalahan pendaftaran tersebut, sudah menjadi kewajiban dari Dirjen HKI untuk lebih teliti dalam

melaksanakan tugasnya di kemudian hari. Sehingga tidak akan mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sebagai contoh putusan dapat ditemukan berbagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dalam kasus merek mesin pompa air merek SHIMIZU+Huruf Jepang melawan merek SHIMIZU model PS 130 BIT. Kasus dengan nomor putusan 206/ Pid.B/2009/PN.Mks. tersebut diketahui sebagai bentuk pelanggaran hak atas merek karena merek SHIMIZU model PS 130 BIT dibandingkan dengan mesin pompa air merek SHIMIZU + Huruf jepang yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata, huruf, bunyi ucapan sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut.

Contoh lain dalam putusan nomor 03/HAKI/2009/PN.Niaga Mks. Perkara sengketa merek antara PEGADAIAN selaku penggugat melawan PEGADAIAN Multi Guna selaku tergugat. Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh pihak pegadaian tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk immaterial yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kerancuan yang timbul di masyarakat mengenai nama PEGADAIAN yang merupakan merek secara resmi/sah telah menjadi milik penggugat. Kerancuan yang timbul di masyarakat atas penggunaan nama PEGADAIAN tersebut berupa ketidakjelasan lembaga mana yang secara hukum berhak menggunakan merek PEGADAIAN dalam menawarkan produk jasa gadai.

Hal lain yang juga harus diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana ciri dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Oleh karena

itu sudah seharusnya negara kita juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek. Dan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh aturan yang lama yaitu sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Dengan sistem ini kepastian hukum akan lebih terjamin. Pendaftaran Merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. Oleh karena orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan kata lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak perlu merasa khawatir lagi terhadap tuntutan orang lain. Sebab dengan pendaftaran mereknya itu dia telah dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001.

Namun demikian, menurut penulis sistem konstitutif bukanlah tanpa kelemahan. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) memang lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, namun tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.

Hal tersebut juga tercantum dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan pula bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beriktikad baik.

Walaupun hak merek merupakan hak eksklusif namun hal tersebut bukanlah sebuah praktik monopoli yang dilarang sebagai bentuk persaingan tidak sehat, tetapi merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan insentif pengembangan daya intelektual untuk sebuah persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 menunjukkan bahwa hak atas merek dapat dipertahankan oleh pemiliknya sepanjang hak tersebut masih melekat padanya, artinya hak atas merek tersebut belum dicabut oleh negara. Ini karena hak tersebut tidak diperoleh dengan sendirinya melainkan harus melalui proses pendaftaran. Jika pendaftaran tidak dilakukan maka tidak akan timbul hak sehingga pendaftaran tersebut sifatnya wajib.

Pemberian hak atas merek diserahkan dalam bentuk sertifikat hak merek. Dengan sertifikat tersebut hak eksklusif merek timbul dan pemiliknya dapat menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu ada juga yang disebut perjanjian lisensi. perjanjian tersebut dapat mengurangi sifat eksklusif merek. Hal tersebut merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan atas merek dikecualikan

dari kebijakan anti monopoli sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang berbunyi:

Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Apa yang tertuang dalam aturan tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan mengenai undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak berlaku. Artinya, perjanjian lisensi merek yang bertujuan memakai merek orang lain untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan. Selain itu perjanjian lisensi ini juga bertujuan agar orang lain dapat menggunakan merek yang sudah terdaftar secara legal.

2. Ancaman sanksi terhadap pelanggaran hak atas merek

Penerapan sanksi terkait pelanggaran hak atas merek dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi maupun sanksi pidana.² Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ada disebutkan mengenai ganti kerugian. Dalam pasal 76 dikatakan bahwa:

- 1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

² Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 11 April 2017.

2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan Niaga.³

Hak merek adalah suatu hak kebendaan, maka konsekuensinya hak merek tersebut terdapat hak absolut yakni diberikannya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.⁴

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka gugatannya dikategorikan peristiwa perbuatan melawan hukum, tetapi jika pelanggaran itu termasuk perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya maupun sebagian, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari gugatan tersebut, yaitu:

1. Berupa permintaan ganti rugi
2. Penghentian pemakaian merek.

Menurut penulis, ganti rugi itu berupa ganti rugi materiil maupun immaterial. Ganti rugi materiil jelas mengacu kepada ganti kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Oleh karena akibat pemakaian merek oleh pihak lain yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk atau barang yang dimiliki menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen lebih memilih barang yang menggunakan merek palsu yang

³ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁴ Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 11 April 2017.

diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar dipasaran.

Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas atau mutu yang rendah sehingga merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian tersebut dalam bentuk kerugian nyata dan kerugian tidak nyata.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini merupakan bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar pada *onrechtmatigedaad* (pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001) dan *wanprestasi* (pasal 77-78 UU No. 15 Tahun 2001).

Alasan kemudian mengapa Peristiwa yang diatur dalam pasal 76 disebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena lahirnya hak dan kewajiban didasarkan oleh Undang-undang dan bukan dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam pasal 77 dan 78 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian (lisensi).⁵

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa diatas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam

⁵ Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 11 April 2017.

KUHPerdata, yang disebut sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebut sebagai *Lex Specialis*.

Beralih dari gugatan perdata, tuntutan pidana terdapat dalam pasal 90 dan pasal 91 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,-.

Dari keseluruhan delik pidana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, semuanya merupakan delik aduan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 95 yang berbunyi: Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, dan pasal 94 merupakan delik aduan.

Delik aduan adalah suatu tindak pidana yang hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Konsekuensi hukum terhadap delik aduan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yakni pihak yang berwajib akan memeriksa dan memproses suatu tindak pidana apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan ini bersifat pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif penuntutan.

Oleh karena hak merek bersifat privat sehingga jauh lebih efektif menggunakan delik aduan. Polisi tidak boleh serta-merta melakukan penangkapan selama tidak ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan catatan tidak menimbulkan dampak yang masif dan menyeluruh.⁶

Menurut hemat penulis, pemberlakuan delik aduan dalam hukum merek dikarenakan hanya pemilik mereklah yang mengetahui persis perihal merek yang dia daftarkan. Baik itu dari segi gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan unsur-unsur lain yang menjadikan merek tersebut berbeda dari merek lain. Sehingga yang berhak menentukan merek tersebut telah dijiplak oleh pihak lain hanya pemilik saja yang kemudian berimplikasi hanya pemegang hak merek yang mempunyai hak untuk kemudian melakukan tindak pelaporan.

Dari banyak kasus pelanggaran hak atas merek penjatuhan sanksi lebih banyak diberikan berupa ganti kerugian dan sanksi pidana. Padahal, sanksi yang paling berat sesungguhnya adalah sanksi administrasi berupa penghentian pemakaian merek.

Menurut Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makassar, Adakalanya seorang pemilik merek terkenal memanfaatkan kondisi ketika mereknya disalahgunakan oleh pihak lain sebagai ajang promosi. Pemilik

⁶ Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 11 April 2017.

merek yang melakukan hal tersebut pada umumnya adalah pemilik merek yang telah memiliki *brand image* yang baik dan sudah sangat melekat dihati konsumen. Sebagai contoh, merek sepatu Nike. walaupun dipalsukan, sama sekali tidak akan memberikan dampak buruk bagi pemegang hak mereknya. Merek Nike telah berhasil membangun *brand image* berdasarkan mutu atau kualitas. Sehingga munculnya produk dengan nama yang sama tidak akan memberi pengaruh buruk terhadap pemilik mereknya. Konsumen sudah sangat mengetahui kualitas dari sepatu merek Nike. Hal tersebut malah dinilai sebagai peluang bagi pemilik merek untuk promosi agar semakin membesarkan namanya.

Akan tetapi bagi konsumen hal tersebut tidak selamanya menguntungkan. karena pada kenyataanya konsumen akan mengkonsumsi barang secara keliru yang kualitasnya berbeda dari biasanya. Hal tersebut akan sberdampak pada ketidakpuasan dalam menikmati produk tersebut karena kualitas produk yang dihasilkan berbeda. Dengan demikian, maka segala bentuk merek yang terindikasi memiliki kemiripan dengan suatu merek yang terlebih dahulu ada berdampak memberikan kerugian bukan hanya bagi pelaku usaha tapi juga bagi konsumen.

Aturan terkait merek sudah sangat baik, terbukti dengan adanya beberapa kali revisi mengenai aturan merek itu sendiri. Hal tersebut berarti perbaikan terus dilakukan sehubungan dengan pelayanan dibidang merek. Permasalahan kemudian adalah penegakan dilapangan oleh aparat kepolisian ketika terjadi tuntutan pidana masih sangat kurang. Hal itu diakibatkan pemahaman polisi mengenai HaKI pada

umumnya dan hak merek secara khusus masih sangat kurang. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi yang mereka terima. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham agar tidak ada lagi kerancuan mengenai hak merek. Implementasi di lapangan memerlukan profesionalitas para penegak hukum.⁷

Keprofesionalitasan para penegak hukum dibutuhkan karena selain melindungi hak-hak pemegang hak merek juga harus melindungi pemakai atau konsumen pengguna merek tertentu. Dengan demikian, agar konsumen dapat diberikan perlindungan sehingga tidak keliru didalam mengkonsumsi suatu produk, salah satu unsur yang menentukan bahwa suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, adalah dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai.



⁷ Kadarisman Al-Riskandar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 11 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Banyaknya merek yang sama baik kesuluruhan maupun pada pokoknya yang beredar di masyarakat tidak hanya dikarenakan adanya pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan. Tetapi juga karena ketidak telitian pada proses pendaftaran merek pada Dirjen HKI. Ketidak telitian Dirjen HKI dalam proses pemeriksaan merek mengakibatkan kerancuan serta kerugian terhadap pemilik merek dan pendaftar merek selanjutnya. Sehingga dalam hal ini sudah menjadi kewajiban Dirjen HKI untuk lebih teliti dalam melaksanakan proses pendaftaran merek dikemudian hari.
2. Ancaman sanksi pada kasus pelanggaran hak atas merek yaitu sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi. Pada banyak kasus pelanggaran merek pemberlakuan sanksi lebih banyak berupa sanksi pidana dan perdata, padahal sanksi yang paling berat sesungguhnya adalah sanksi administrasi berupa penghentian pemakaian merek.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hendaklah Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang dalam hal pendafataran merek, lebih teliti dalam proses pendaftaran merek.
2. Sebelum melakukan tahapan-tahapan pendaftaran, baik pihak pendaftar maupun Dirjen HKI melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap merek yang akan

didaftar. Hal tersebut untuk menghindari terbitnya sertifikat merek dengan merek yang sama baik keseluruhan maupun pada pokoknya.

3. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi. Dengan pemberlakuan sanksi administrasi maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Glick, Mark A, dkk. *Intellectual Property Damages: Guidelines and analiysis.*

Hoboken, New Jersey:John Wiley & sons, Inc

Hasyim, Farida. *Hukum Dagang.* Jakarta:Sinar Grafika, 2013

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: cara mudah mempelajari Undang-undang Merek.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenai HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya.* Jakarta:Esensi, 2008.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights.* Bogor:Ghalia Indonesia, 2005

Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta:RajaWali Pers, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Soenandar, Taryan. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta:Sinar Grafika, 1996.

Supramono, Gatot. *Kedudukan perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata*. Jakarta:Rineka Cipta, 2007.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian*. Makassar: Alauddin press, 2013.

Wijaja, Gunawan . *Seri Hukum Bisnis:Lisensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. “Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek”.

Republik Indonesia “Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Republic Indonesia “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas”.

REFERENSI LAIN

Yi Zhang, **The Impact of Brand Image on Consumer Behavior: A Literature**

Review.[http://www.scirp.org/journal/ojbmhttp://dx.doi.org/10.4236/ojbm.201](http://www.scirp.org/journal/ojbmhttp://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2015.31006)

5.31006 (16 januari 2015)

Ridgway, William E, **Revitalizing the Doctrine of T rademark Misuse.**

<http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol21/iss4/7> (September 2006)

Janice Bywaters and Luke Mckavanagh, **The Benefits Of Registering A Trade**

Mark. <http://www.btlaw.com.au>

www.Mari-belajardanberbagi-ilmu.blogspot.co.id/2013/06/hak-merek.html

www.globomark.com/trademarks_indonesia.html

[http://id.m.wikipedia.org/wiki.bauran_pemasaran](http://id.m.wikipedia.org/wiki/bauran_pemasaran)

www.pendaftaranmerekdagang.com/contoh-hak-merek/

<http://www.google.co.id/amp/s/rizkyjamie.wordpress.com/2013/06/12/pengertian-merek-hak-atas-merek-dan-pemilik-merek/amp/>

<http://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/lisensi-merek-dan-keterkaitannya-dengan-persaingan-usaha/>

jurnal.untag-sby.ac.id

download.portalgaruda.org

repository.usu.ac.id

www.djlpe.esdm.go.id



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 707 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Wiwi Wardani
N I M : 10500113093
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek di Kota Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
Penguji II : Drs. H. Munir Salim, M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 12 Juni 2017

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 291 Tahun 2017

TENTANG

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Wiwi Wardani
N I M : 10500113093
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Jum.at, 2 Juni 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Terhadap Hak Merek sebagai Salah Satu Aset Perusahaan"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Ahkam Jayadi, S.H, M.H.
Penguji : Drs. H. Munir Salim, M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 30 Mei 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.9/ /2016
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi
An. **Wiwi Wardani/ 10500113093**

Kepada Yth;

1. **Dr. Kasjim Salenda, SH., M. TH. I** Sebagai Pembimbing I.
2. **Erlina, SH., MH** Sebagai Pembimbing II.

Di-

Samata

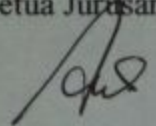
Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri **Seminar** dan melaksanakan serta bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Waktu : 14.00 WITA - selesai
Tempat/Ruangan : Jurusan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **"Dampak Hukum Pemalsuan Merek Terhadap Omset Pemegang Hak Merek"**

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 22 Juni 2016

Wassalam,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


/ **Istiqamah, SH., MH.**
NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 383 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 7 April 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 7 April 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 1551 SL.1/PP.00.9/03/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata 31 Maret 2017

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Makassar**

Di-Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Wiwi Wardani
N I M	: 10500113093
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin III Lr.8

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Tinjauan Terhadap Hak Merek sebagai Salah Satu Aset Perusahaan"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Kasjim Salenda., SH.,M.Th.I**
2. **Erlina, SH.,MH**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 03 April 2017 – 03 Mei 2017

Demikian harapan kami dan terimakasih

Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.

Wassalam
Yang Berketuhanan & Berkeadilan
Belkin.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

***TINJAUAN TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI SALAH SATU ASET
PERUSAHAAN***

Disusun dan Diajukan Oleh

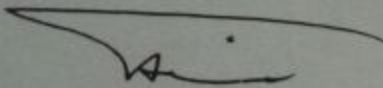
**Wiwi Wardani
NIM : 10500113093**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan

Penulisan skripsi

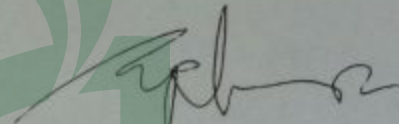
Pada tanggal : 22 Maret 2017

Pembimbing I



Dr. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I
NIP. 19600817 199203 1 001

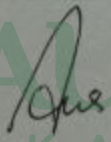
Pembimbing II



Erlina, SH.,MH
NIP. 19691219 200501 2 003

Diketahui Oleh


Ketua Jurusan Ilmu Hukum

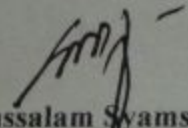


**ALAUDDIN
MAKASSAR**

Istiqamah, SH., MH
NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

 **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jalan R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : info@pn-makassar.go.id, pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

LEMBAR DISPOSISI KEPANITERAAN

Tanggal dan nomor surat : 31 MARET 2017 / 1551 SI.1 / PP.00.9 / 03 / 2017
Asal Surat : UIN ALAUDDIN
Sifat Surat : Biasa/Penting/Rahasia
Isi Ringkasan : Permohonan Izin Penelitian
Alas nama : Wiwi Wardani

No. Reg. Surat : 2687. Tgl. 04 APRIL 2017

Instruksi/informasi Ketua/Wakil Ketua ditujukan kepada :

1. Wakil Ketua
2. Hakim/Majelis Hakim
3. Panitera
4. Wakil Panitera
5. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Muda Perdata
7. Panitera Muda Pidana
8. Panitera Muda Niaga
9. Humas
10. Panitera Muda PHI.
11. Panitera Muda TIPIKOR
12.

Panitera diteruskan Kepada :

1. Wakil Panitera
2. Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Niaga
6. Humas
7. Panitera Muda PHI
8. Panitera Muda TIPIKOR
9.

Tanggal terima :

Pelaksana :



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk saudara : **1. Dr. Kasjim Salenda, SH., M.TH.I**
: 2. Erlina, SH.,MH.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : **Wiwi Wardani**
N I M : **10500113093**
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **"Dampak Hukum Pemalsuan Merek Terhadap Omset Pemegang Hak Merek"**

- Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 21 Juni 2016

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wiwi Wardani Lahir di Kota Makassar tanggal 7 Desember tahun 2002, ia merupakan anak ke-2 dari-6 bersaudara dari pasangan **Udin** dan **Wati Ramli** yang merupakan Suku Makassar yang tinggal dan menetap di Kota Makassar. Ia menghabiskan masa pendidikan sekolah dasar SDN Labuang Baji III pada tahun 2000-2006.

Ia melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 26 Makassar pada tahun 2006-2008, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Makassar yang kemudian pindah ke SMA Muhammadiyah 3 Makassar pada tahun 2011. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur SPBM dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama.

